

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH – POKOK – POKOK

2009

PERDA KOTA MAGELANG NO. 2 , LEMBARAN DAERAH NOMOR : 3 55 HLM+
LAMP

PERATURAN DAERAH TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH.

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan penyesuaian Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2004 maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dasar Hukum PERDA ini adalah :

UU No. 17 Th 1950; UU No. 28 Th 1999; UU No. 17 Th 2003; UU No. 1 Th 2004; UU No. 10 Th 2004; UU No. 15 Th 2004; UU No.25 Th 2004; UU No. 32 Th 2004; UU No. 33 Th 2004; PP No. 24 Th 2005; PP No. 58 Th 2005; PP No. 3 Th 2007; PP No. 38 th 2007; PP No. 39 Th. 2007; PP No. 41 Th 2007; Perpres No. 1 Th 2007; Perda Kota Magelang no. 2 Th 2008.

Perda ini mengatur tentang:

1. Ketentuan Umum yang memuat istilah-istilah yang berkaitan dengan Perda ini.
2. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - b. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah
 - c. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
 - d. Pejabat Pengguna Anggaran Atau Pengguna Barang Daerah
 - e. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD
 - f. Pejabat Penata Usaha Keuangan SKPD
 - g. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran
3. Asas Umum Dan Struktur APBD
 - a. Asas Umum APBD
 - b. Struktur APBD
 - c. Pendapatan Daerah
 - d. Belanja Daerah
 - e. Surplus/(Defisit) APBD
 - f. Pembiayaan Daerah
4. Penyusunan Rancangan APBD
 - a. Rencana Kerja Pemerintah daerah
 - b. Kebijakan Umum APBD
 - c. Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara
 - d. Rencana Kerja Dan Anggaran SKPD
 - e. Penyiapan Raperda APBD
5. Penetapan APBD

- a. Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD
 - b. Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD
 - c. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Walikota Tentang Penjabaran RAPBD
 - d. Penetapan Peraturan daerah Tentang APBD dan Peraturan Walikota Tentang Penjabaran APBD
6. Pelaksanaan APBD
 - a. Asas Umum Pelaksanaan APBD
 - b. Penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah
 - c. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan daerah
 - d. Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah
 - e. Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Daerah
 7. Laporan Realisasi Semester Pertama APBD Dan Perubahan APBD
 - a. Laporan Realisasi Semester Pertama APBD
 - b. Perubahan APBD
 8. Penatausahaan Keuangan Daerah
 - a. Asas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah
 - b. Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah
 - c. Penatausahaan Bendahara Penerimaan
 - d. Penatausahaan Bendahara Pengeluaran
 - e. Akuntansi Keuangan Daerah
 9. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
 10. Pengendalian Defisit Dan Penggunaan Surplus Anggaran
 - a. Pengendalian Defisit APBD
 - b. Penggunaan Surplus APBD
 11. Kekayaan Dan Kewajiban
 12. Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pembinaan dan Pengawasan
 - b. Pengendalian Intern
 - c. Pemeriksaan Ekstern
 13. Penyelesaian Kerugian Daerah
 14. Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum Daerah
 15. Ketentuan Peralihan

Semua peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlaku.
 16. Ketentuan Penutup

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

CATATAN : Semua peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

Peraturan Daerah Kota Magelang No. 3 Th 2004 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan Daerah ini ditetapkan di Magelang pada tanggal 23 Pebruari 2009.

Diundangkan pada tanggal 23 Pebruari 2009 dalam Lembaran Daerah Kota Magelang No. 3.